



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2013

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Balikpapan Kubangun, Kujaga, Kubela

KATA PENGANTAR

Pergeseran nilai manajemen pemerintahan menjadi manajemen pemerintahan berbasis kinerja, yang berorientasi pada berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi komitmen.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), merupakan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen untuk mengimplementasi akuntabilitas kinerja dalam manajemen pemerintahan.

Salah satu bentuk komitmen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Berikut akan diuraikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013, yang menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 diperlukan dalam penyempurnakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada waktu yang akan datang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN FADLI

Pembina Utama Madya

NIP.19620509 198701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG 1
	B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
	C. ASPEK STRATEGIS 3
	D. STRUKTUR ORGANISASI 3
	E. SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II	RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA
	A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) 6
	1. VISI DAN MISI
	2. TUJUAN DAN SASARAN
	3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 21
	C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA 31
	B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 55
BAB IV	PENUTUP
	A. KESIMPULAN 57
	B. SARAN 58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN	
2. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);	
3. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013;	
4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013.	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya rencana kinerja tahunan, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 6 (Enam) Sasaran Strategis dengan 54 (limapuluh empat) indikator kinerja dalam rangka pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 54 (limapuluh empat) indikator kinerja, disimpulkan bahwa :

1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 28 indikator kinerja dengan realisasi capaian 85.45%.

2. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 165.75%.

3. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 106.74%.

4. Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 100%.

5. Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5 terdiri dari 7 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 92.37%.

6. Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 94%.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Balikpapan sekarang dan masa datang.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID MN FADLI
Pembina Utama Madya
NIP.19620509 198701 1 001

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III Mandiri, Eselon II ke atas wajib menetapkan / merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam merealisasikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu unit Esselon II A di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang di susun dengan mengacu kepada RPJMD dan Visi Misi Kota Balikpapan dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sekaligus menjawab masalah dan tantangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan perlu disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini di buat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum demi tercapainya Akuntabilitas kinerja seluruh Perangkat Daerah. Dengan dirumuskannya rencana strategis ini, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu unit kerja Esselon II A telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan masa mendatang dengan pemahaman dan respon dari semua Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Stakeholder lainnya.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf (Staffing), fasilitasi dan unsur staf perumus (Drafter) harus selalu berada didepan dalam meningkatkan pelayanan administratif dan pelayanan umum terhadap aparatur. Oleh karena itu sebagai unsur staf (Staffing) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

Seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dimana salah satunya adalah perubahan organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Daerah melaksanakan **penyesuaian dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program kegiatan** sehingga menjadi lebih jelas dan terukur serta terdokumentasikan dalam dokumen **review perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam periode 5 (lima) tahun.**

1. VISI DAN MISI

Organisasi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, disini Sekretaris Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru Pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya adaptasi dengan tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut dan mengacu Visi Kota Balikpapan yaitu :

"MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN "

maka dirumuskan Visi Sekretariat Daerah yaitu :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN KOORDINASI YANG EFEKTIF MENUJU KEPERINTAHAN YANG BAIK."

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah haruslah mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik.

Pernyataan Misi membawa organisasi Pemerintahan kepada satu focus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (**action plan**) perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Berdasarkan Visi Sekretariat Daerah maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum.
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.
3. Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
5. Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.
6. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum.

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas layanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima.

Sasaran : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 2 : Peningkatan kesadaran hukum.

Sasaran : Melaksanakan penataan perundang-undangan;

Misi 2 Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

Tujuan : Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Sasaran : Meningkatnya hubungan kerja

Misi 3 Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur

Tujuan : Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur

Sasaran : Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur
Mengembangkan kompetensi aparatur.

Misi 4 Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

Tujuan : Optimalisasi kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas

Sasaran : Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Misi 5 Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien

Tujuan : Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana

Sasaran : Peningkatan sistem pengelolaan sarana prasarana

Indikator tujuan dan indikator sasaran dari rencana strategis Sekretaris Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas layanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima.

Indikator : Terwujudnya pelayanan prima

Sasaran : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Indikator : 1. Jumlah RT
2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota
3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik
4. Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)
5. Persentase penduduk yang memiliki KTP
6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran
7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM
8. Angka kemiskinan
9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti
11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti
12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi
13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.
14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa
15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan
16. Persentase penyelesaian pertanahan
17. Nilai investasi

18. Angka inflasi/Angka PDRB
19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi
20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas
21. Penganekaragaman pangan
22. Persentase realisasi anggaran
23. Persentase administrasi batas wilayah
24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib
25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah
Negara
26. Angka kriminalitas
27. Cakupan penanganan bencana
28. Persentase tanah yang dibebaskan Pemkot

Tujuan 2 : Peningkatan kesadaran hukum.

Indikator : Masyarakat dan aparaturnya taat hukum

Sasaran : Melaksanakan penataan perundang-undangan;

Indikator : 29. Persentase penerbitan Peraturan Daerah
30. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum
lainnya
31. Jumlah :
➤ Perda
➤ Perwal
➤ Keputusan
32. Persentase keluarga sadar hukum
33. Jumlah pelanggaran PERDA
Persentase penyelesaian perkara hukum

Tujuan : Membangun pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Indikator : Adanya pola sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Sasaran : Meningkatnya hubungan kerja

Indikator : 34. Jumlah *coffee morning*
35. Jumlah rapat MUSPIDA
36. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan
37. Jumlah kegiatan Kepala Daerah
38. Persentase tindak lanjut hasil *coffee morning*
39. Jumlah jumpa pers
40. Jumlah talk show
41. Jumlah kerjasama

Tujuan : Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur

Indikator : Terwujudnya apartur yang profesional dan sejahtera

Sasaran : Meningkatnya profesional dan kesejahteraan aparatur
Mengembangkan kompetensi aparatur.

Indikator : 42. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur

Tujuan : Optimalisasi kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas

Indikator : Optimalnya kelembagaan, tatalaksana dan akuntabilitas

Sasaran : Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Indikator : 43. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD
44. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

- 45. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu
- 46. Persentase SKPD yang memiliki SOP
- 47. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan
- 48. Persentase jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan
- 49. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP
- 50. Persentase SKPD yang telah menggunakan *paperless office*
- 51. Persentase PPID Pembantu di SKPD

Tujuan : Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana

Indikator : Optimalnya pengelolaan sarana prasarana

Sasaran : Peningkatan sistem pengelolaan sarana prasarana

Indikator 52. Tersedianya rencana kebutuhan barang
 53. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi, adalah sebagai berikut

- a. Menyusun rencana dan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan daerah.
- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- d. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan administratif bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Meningkatkan pengendalian dan sistem informasi pembangunan daerah.
- g. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja.
- h. Menyusun konsep kebijakan penegakan disiplin aparatur, peningkatan etos dan budaya kerja, dan pemberdayaan aparatur daerah.
- i. Melaksanakan evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah serta analisis formasi jabatan.
- j. Menyusun rencana dan merumuskan ketatalaksanaan, sistem dan prosedur tata kerja, dan tertib administrasi kedinasan.
- k. Meningkatnya penyebaran informasi, program good governance.
- l. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan perekonomian dan pembangunan.
- m. Menyiapkan rencana kebijakan program sosial dan kesra.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain :

- a. Pembinaan dan pengawasan tugas – tugas dinas, lembaga teknis daerah.
- b. Desentralisasi urusan wajib dan urusan pilihan serta model perencanaan dari bawah yang serasi dengan model perencanaan daerah.
- c. Standarisasi administrasi pemerintahan.
- d. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.
- e. Menindaklanjuti regulasi aturan pemerintah pusat dan menyelaraskan aturan daerah dan pusat.

4. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja dan Target.

Seiring dengan perubahan kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 juga mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai hasil revisi adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1. Jumlah RT 2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota 3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik 4. Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk.	1541 17,64% 53,92% 32

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		Propinsi, Nasional dan Internasional)	
		5. Persentase penduduk yang memiliki KTP	87%
		6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	62,76%
		7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	58
		8. Angka kemiskinan	10.112
		9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	70%
		10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	85%
		11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%
		12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	46
		13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	60:40

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	70%
		15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	120
		16. Persentase penyelesaian pertanahan	70%
		17. Nilai investasi	5T
		18. Angka inflasi/ Angka PDRB	6,41%
		19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	72476009 (000)
		20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	10,6%
		21. Penganekaragaman pangan	100% (8
		22. Persentase realisasi anggaran	Kegiatan) 2
		23. Persentase administrasi batas wilayah	70%
		24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	75%
		25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	123 317
		26. Angka kriminalitas	
		27. Cakupan penanganan bencana	24 127

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		28. Persentase tanah yang dibebaskan Pemkot	70%
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	29. Persentase penerbitan Peraturan Daerah 30. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya 31. Jumlah : ➤ Perda ➤ Perwal ➤ Keputusan 32. Persentase keluarga sadar hukum 33. Jumlah pelanggaran PERDA 34. Persentase penyelesaian perkara hukum	90% 100 13 47 437 100% 500 80%
3.	Meningkatnya hubungan kerja	35. Jumlah <i>coffee morning</i> 36. Jumlah rapat MUSPIDA 37. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan 38. Jumlah kegiatan Kepala Daerah 39. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i> 40. Jumlah jumpa pers 41. Jumlah talk show	52 23 12 254 100% 13 12

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
		42. Jumlah kerjasama	3
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	43. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	2
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	44. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD 45. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 46. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu 47. Persentase SKPD yang memiliki SOP 48. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan 49. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP 50. Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i> 51. Persentase PPID Pembantu di SKPD	100% 90% 80% 50% 45% 25% 5 75%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	52. Tersedianya rencana kebutuhan barang 53. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	100% 100%

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Demi terarahnya pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1. Jumlah RT 2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota 3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik 4. Jumlah prestasi/penghargaan yang diterima Kota Balikpapan(Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional) 5. Persentase penduduk yang memiliki KTP 6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM 8. Angka kemiskinan 9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti 11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti 12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi 13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung. 14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa 15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Humas dan Protokol Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Organisasi Bagian Perekonomian Bagian Pembangunan Bagian kesra Bagian Kesra Bagian Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
		16. Persentase penyelesaian pertanahan 17. Nilai investasi 18. Angka inflasi dan PDRB 19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi 20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas 21. Penganekaragaman pangan 22. Persentase realisasi anggaran 23. Persentase administrasi batas wilayah 24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib 25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara 26. Angka kriminalitas 27. Cakupan penanganan bencana 28. Persentase tanah yang dibebaskan Pemkot	Bagian KDAWP Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Keuangan Bagian KDAWP Bagian Pemerintahan Bagian KDAWP Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian KDAWP
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	29. Persentase penerbitan Peraturan Daerah 30. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya 31. Jumlah : ➤ Perda ➤ Perwal ➤ Keputusan 32. Persentase keluarga sadar hukum 33. Jumlah pelanggaran PERDA 34. Persentase penyelesaian perkara hukum	Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum
3.	Meningkatnya hubungan kerja	35. Jumlah <i>coffee morning</i> 36. Jumlah rapat MUSPIDA	Bagian Humas dan Protokol Bagian Umum dan Perlengkapan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
		37. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan 38. Jumlah kegiatan Kepala Daerah 39. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i> 40. Jumlah jumpa pers 41. Jumlah talk show 42. Jumlah kerjasama	Bagian Pemerintahan Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol Bagian KDAWP
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	43. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	Bagian Organisasi
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	44. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD 45. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu 46. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu 47. Persentase SKPD yang memiliki SOP 48. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan 49. Persentase jabatan yang telah memiliki standar kompetensi jabatan 50. Persentase SKPD yang mendapatkan nilai BB pada penilaian LAKIP 51. Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i> 52. Persentase PPID Pembantu di SKPD	Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi dan Protokol

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	53. Tersedianya rencana kebutuhan barang 54. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	Bagian umum Perlengkapan Bagian umum Perlengkapan

C. PENETAPAN KINERJA 2013

Dokumen penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. penetapan kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen penetapan kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Seiring dengan perkembangan APBD Kota Balikpapan dan hasil penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2013 mengalami perubahan seiring dengan penetapan APBD Perubahan Tahun 2013.

Secara rinci, penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	6	7
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1542	Penilaian lomba Pengelola Terbaik Administrasi RT Tingkat Kota Balikpapan	Rp.272.002.000,00
		2 Persentase Kelurahan berprestasi	17,64%	Pembinaan dan pemberian reward Lurah berprestasi 2013	Rp.101.342.000,00
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	53,92	Pengadaan buku Administrasi Kecamatan, Kelurahan dan RT	Rp. 47.812.000,00
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	32		
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	87%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 543.920.000,00
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	63%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 401.270.000,00
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	58%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 222.700.000,00
		8 Angka kemiskinan	10112 RTS	Operasional Program Raskin	Rp 474.796.000,00
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>e- procurement</i>	70%	Belanja Makan kelompok Kerja ULP	Rp 616.000.000,00
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	85%	Program Bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan Kepada Anggota Masyarakat	Rp 10.671.511.124,00
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%	Program Pemberian hibah Pemerintah kota Balikpapan Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	Rp 79.251.926.540,00
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	46	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Teknologi Informasi	Rp 424.207.000,00
		13 Persentase (perbandingan) proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	60:40%	8 Program Kegiatan	Rp 5.294.657.300,00
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	100%	1. Pengendalian Kegiatan APBD	Rp 267.180.200,00
				2. Operasional Pelaksanaan Pengadaan Investasi Pembangunan Coastal Road	Rp 875.000.000,00

				3. Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan	Rp	321.543.000,00
				4. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp	277.455.500,00
				5. Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota	Rp	127.482.000,00
				6. Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012	Rp	204.690.000,00
				7. Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kota Balikpapan	Rp	2.504.470.000,00
				8. Operasional Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Rp	716.836.600,00
		15	Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	4 buku (120)	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277.455.500,00
		16	Persentase penyelesaian pertanahan	100% (25 keg)	Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Rp 43.925.000,00
		17	Nilai investasi	5T		
		18	a. angka inflasi	6.41%		
			b. Angka PDRB	72.406.009,00		
		19	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10,60%		
		20	Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	100% (8 keg)		
			Jumlah angkutan	1945		
			jumlah pasar tradisional	17		
			jumlah rumah sakit	87		
			jumlah hotel	60		
			Jumlah Restoran	372		
			Jumlah Toko/ supermarket	14		
			Jumlah Bank	143		
			Ketersediaan Listrik	191.169,7		

		21	Penganekaragaman pangan	2	Diversifikasi Pangan	Rp	212.275.000,00
		22	Persentase realisasi anggaran	55%	Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran Setdakot Balikpapan	Rp	104.790.500,00
		23	Persentase administrasi batas wilayah	100%	1. Percepatan Pembangunan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi 2. Rakor Administrasi Batas Wilayah/Kota/ Kecamatan dan kelurahan	Rp	834.000.000,00
		24	Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Rp	760.335.000,00
		25	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	100%	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan izin Membuka/ Memanfaatkan tanah negara	Rp	1.188.854.000,00
		26	Angka kriminalitas	2189			
		27	Cakupan penanganan bencana	69	Penanganan Kejadian Bencana dan kebakaran	Rp	2.409.400.000,00
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	29	Persentase penerbitan Peraturan Daerah	90%			
		30	Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	12	Penyuluhan Produk Hukum	Rp	316.000.000,00
		31	Jumlah :		Legislasi produk hukum daerah	Rp	665.482.000,00
		1. Perda	10				
		2. Perwal	10				
		3. Keputusan	300				
		32	Persentase keluarga sadar hukum	100%	Pembinaan Keluarga sadar hukum	Rp	107.150.000,00
		33	Jumlah pelanggaran PERDA	500	Pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan Daerah	Rp	84.830.000,00
		34	Persentase penyelesaian perkara hukum	100%	Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum	Rp	393.194.176,00
3	Meningkatnya hubungan kerja	35	Jumlah <i>coffee morning</i>	52			
		36	Jumlah rapat MUSPIDA	23	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah	Rp	2.500.000.000,00

		37	Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	12	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp	273.025.000,00
		38	Jumlah kegiatan Kepala Daerah	254	Pelaksanaan acara kedinasan dan penerimaan tamu pemerintah kota Balikpapan di luar jam kerja	Rp	932.882.000,00
		39	Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%			
		40	Jumlah jumpa pers	13	Jumpa Pers	Rp	146.450.000,00
		41	Jumlah talk show	12	Talkshow di Radio dan Tv	Rp	150.898.000,00
		42	Jumlah kerjasama	3 Keg	1. Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Rp	608.200.000,00
		2. Forum Kerjasama antar pemerintah dari Pihak ketiga	Rp		951.818.000,00		
		3. Fasilitas Citynet Indonesia Chapter	Rp		685.960.000,00		
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	43	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	2	Implementasi Reformasi Birokrasi	Rp.	187.070.000,00
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	44	Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	Penyusunan LAKIP Kota Balikpapan Tahun 2013	Rp.	199.788.000,00
		45	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	-		-
		46	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	100%	Pengembangan sistem evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp	277.455.500,00
		47	Persentase SKPD yang memiliki SOP	50%	Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPD	Rp	143.260.000,00
		48	Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	45%	Revisi Kelembagaan	Rp	250.000.000,00
		49	Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	5	Implementasi Paperless Office	Rp	53.325.000,00

6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	50	Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	pembentukan ppid	Rp	87.700.000,00
		51	Tersedianya rencana kebutuhan barang	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
		52	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	100%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	77.493.295.250,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis dilakukan melalui media Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya dalam hal ini pengukuran kinerja.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja**. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai institusi yang mewujudkan Pelayanan Prima Dan Koordinasi Yang Efektif Menuju Pemerintahan Yang Baik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- **85 s.d. 100 = Baik Sekali**
- **70 s.d. <85 = Baik**
- **55 s.d. <70 = Cukup**
- **< 55 = Kurang**

Berikut akan diuraikan tentang informasi pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Sasaran 1 : Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah RT	1.542	1.542	100%	Penilaian Lomba Pengelola Terbaik Administrasi RT Tingkat Kota Balikpapan
2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	17.64%	17.64%	100%	Pembinaan dan Pemberian Reward Lurah Berprestasi 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik	53.92%	53.92%	100%	Pengadaan buku administrasi Kecamatan, Kelurahan dan RT
4. Jumlah prestasi/ penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	32	48	150%	-
5. Persentase penduduk yang memiliki KTP	87%	78.3%	90%	-
6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	63%	50.4%	80%	-
7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	58%	74.71%	128%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Angka kemiskinan	10.112	10.065	99.53%	Operasional Program Raskin
9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	70%	70%	100%	Belanja Kelompok Kerja ULP
10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	85%	67.84%	79.82%	BTL DPA PPKD Bagian Kesra
11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%	85.31%	92.73%	BTL DPA PPKD Bagian Kesra
12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan	46	46	100%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
Sistem Informasi Manajemen/aplikasi				
13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	60% : 40%	73.76% : 26.24%	122% : 65,6%	Pengembangan sistem pelaporan
14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	100%	95.13%	95.13%	Operasional pengadaan barang/jasa
15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	4 buku	4 buku	100%	Pengembangan sistem evaluasi dan pelaporan pembangunan
16. Persentase penyelesaian pertanahan	100% (25 keg)	68% (17 Keg)	68%	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
17. Nilai investasi	5 T	900M	18%	-
18. Angka inflasi dan PDRB	6,41% 7247600 9(000)	6,41% 72476009 (000)	100% 100%	-
19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10,6%	10,17%	95,94%	-
20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	100% (8 keg)	100% (8 keg)	100%	-
21. Penganekaragaman pangan	2	2	100%	-
22. Persentase realisasi anggaran	55%	61.28%	111%	Penyusunan Laporan dan realisasi Anggaran Setdakot Balikpapan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
23. Persentase administrasi batas wilayah	100% (PBU 50 buah, PBA 50 buah)	100% (PBU 50 buah, PBA 50 buah)	100%	Penataan Daerah Otonomi Baru
24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	13	100%	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	100% (168 Rekom)	97.61% (164 Rekom)	97.61%	Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara
26. Angka kriminalitas	2.189	2.189	-	-
27. Cakupan penanganan bencana	69	69	100%	Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 1 penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan rata-rata mencapai **85.45%**.

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 1 penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada pencapaian sasaran 1 penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain :

1. Indikator nilai investasi yang masih berada pada angka 900 M dari 5 T yang ditargetkan. Hal ini disebabkan bahwa saat ini yang telah dihitung adalah investasi dari sektor swasta dan untuk sektor pemerintah belum dapat dihitung.
2. Indikator penyelesaian pertanahan berada pada capaian 67%, mengingat proses penyelesaian tanah memerlukan proses dan pengolahan administrasi serta negosiasi dengan masyarakat yang memerlukan waktu lebih panjang.
3. Indikator Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara berada pada capaian 51,73%, mengingat proses penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah memerlukan pendalaman materi dan pengolahan administrasi yang memerlukan waktu lebih panjang.
4. Indikator angka kriminalitas masih tinggi yaitu berada di angka 2.189. Diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan pihak keamanan untuk meningkatkan kantibmas di wilayah Kota Balikpapan.

Seiring dengan pemekaran Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-479/2013 Tanggal 8 Juli 2013 Tentang Penetapan Lurah Berprestasi Kota Balikpapan 2013, telah ditetapkan 6 (enam) Lurah berprestasi Kota Balikpapan Tahun 2013, yaitu :

1. Ernu Ogan (Lurah Karang Rejo)
2. Nyoto Harsono (Lurah Sepinggian)
3. Suranto (Lurah Margo Mulyo)
4. M.Slamet Djunaidi (Lurah Prapatan)
5. Hari Murti (Lurah Gunungsamarinda)
6. Ali (Lurah Teritip)

Pemenang Pertama Lurah Berprestasi Kota Balikpapan mewakili Kota Balikpapan dalam Lomba Lurah Berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan Timur dan mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp. 17.500.000,- Sedangkan untuk peringkat 2 sampai dengan 6 diberikan dana pembinaan sebesar Rp. 10.000.000,-

Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-582/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Pemenang Lomba Pengelola Terbaik Administrasi Rukun Tetangga (RT) Kota Balikpapan Tahun 2013, telah ditetapkan 6 (enam) Pemenang Lomba Pengelola Terbaik Administrasi Rukun Tetangga (RT) Tahun 2013, yaitu :

Juara I	H. Takdir	Ketua RT 21 Kelurahan Manggar Baru
Juara II	Dofir Efendi	Ketua RT 50 Kelurahan Klandasan Ilir
Juara III	Dzulkifli	Ketua RT 76 Kelurahan Muara Rapak
Juara Harapan I	Sugeng Yuwono	Ketua RT 2 Kelurahan Marga Mulyo
Juara Harapan II	Arwiwin	Ketua RT 42 Kelurahan Sumber Rejo
Juara Harapan III	Sri Maryatun	Ketua RT 31 Kelurahan Sepinggan

Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan standar pelayan minimal khususnya di bidang kependudukan, kepemilikan KTP bagi penduduk Kota Balikpapan tahun 2013 mencapai presentase 90%. Hal ini terjadi karena mobilisasi penduduk pendatang yang meningkat dan tidak diberlakukannya lagi kebijakan KTP sementara dengan jaminan.

Penerbitan akta kelahiran telah mencapai persentase 80% dengan dilaksanakan kegiatan wajib akta kelahiran di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Survei IKM Tahun 2013 dilaksanakan pada 130 SKPD dan unit kerja penyelenggara pelayanan, telah melampaui target tahun 2013 yaitu 65 SKPD dan Unit Kerja Penyelenggara pelayanan. Hal ini dapat tercapai karena perubahan mekanisme pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat, dimana pada tahun lalu menggunakan jasa pihak ketiga sedangkan pada tahun 2013 dilakukan secara swadaya dengan melibatkan peran serta tim surveyor yang terdiri dari Penyuluh KB, Pengawas Sekolah dan PNS Bagian Organisasi.

Survei IKM dilaksanakan pada 130 SKPD dan unit kerja penyelenggara pelayanan, yang terdiri dari :

- a. SKPD : 13
- b. Kecamatan : 5
- c. Kelurahan : 27
- d. Puskesmas : 26
- e. SD : 29
- f. SMP : 15
- g. SMA : 9
- h. SMK : 6

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban di Kota Balikpapan maka dilaksanakan operasi trantib kerjasama seluruh tim ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan antara lain Satpol PP, Kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Rincian kegiatan trantib dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan Pedagang Kaki Lima
2. Penertiban KTP
3. Penertiban Rumah Sewa dan Rumah Kost
4. Rapat Koordinasi Trantib
5. Monitoring pengawasan dan pengendalian penyelenggara tempat usaha hiburan
6. Posko siaga pelayanan masyarakat melibatkan instansi terkait

7. Penutupan lokalisasi KM 17
8. Penetiban orang gila
9. Penertiban gelandangan dan pengemis
10. Operasi pengawasan dan pengendalian ketertiban kota
11. Monitoring dan penertiban lokalisasi manggar sari
12. Penerbitan IMB
13. Penerbitan Pemasangan Baliho dan spanduk.

Pelaksanaan paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses lelang pada Unit Layanan Pengadaan tahun 2013 sebanyak 430 paket bertambah dari tahun 2012 yang berada di angka 231 paket.

Pencapaian sasaran strategis kesatu ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah RT	1542	1542
2. Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	17.64%	35.28%
3. Persentase RT yang memiliki administrasi baik	47%	53.92%
4. Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	32	48
5. Persentase penduduk yang memiliki KTP	80%	90%
6. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	70%	80%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
7. Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	120 %	128%
8. Angka kemiskinan	10112	10065
9. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP	70%	70%
10. Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjuti	79.82%	79.82%
11. Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjuti	90%	92.73%
12. Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	46	46
13. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	67,14% : 32.86%	73.76% : 26.24%
14. Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	70%	95.13%
15. Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	120 (4 Buku)	120 (4 buku)
16. Persentase penyelesaian pertanahan	47%	68%
17. Nilai investasi	14%	18%
18. Angka inflasi dan PDRB	6,41% 72476009 (000)	6,41% 72476009 (000)
19. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10.6	10.17

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
20. Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas	100	100
21. Penganekaragaman pangan	2	2
22. Persentase realisasi anggaran	54.27%	61.28%
23. Persentase administrasi batas wilayah	100%	100%
24. Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	11	13
25. Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	90%	97.61%
26. Angka kriminalitas	2400	2.189
27. Cakupan penanganan bencana	54.33%	100%

Sasaran 2 : Melaksanakan penataan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%	90%	90%	Proses Legislasi Produk Hukum
2. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	12	12	100%	Penyuluhan Produk Hukum

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
3. Jumlah :				
➤ Perda	10	9	90%	Legislasi Peraturan
➤ Perwal	10	39	390%	Perundang-undangan
➤ Keputusan	300	919	306 %	
4. Persentase keluarga sadar hukum	12	12	100%	Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
5. Jumlah pelanggaran PERDA	500	300	150%	Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah
6. Persentase penyelesaian perkara hukum	4	4	100%	Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 2 melaksanakan penataan perundang-undangan rata-rata mencapai **165.75 %**.

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 2 melaksanakan penataan perundang-undangan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Dalam rangka melaksanakan penataan perundang-undangan di Pemerintah Kota Balikpapan, telah dilaksanakan beberapa program prioritas, antara lain Proses Legislasi Produk Hukum, Penyuluhan Produk Hukum, Legislasi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum.

Pada program Legislasi Peraturan Perundang-undangan khususnya Penetapan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota realisasi pencapaian target 3 kali lebih banyak dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 390% untuk penetapan Peraturan Walikota dan 306% untuk penetapan Keputusan Walikota. Hal ini terjadi karena adanya penataan penetapan keputusan pemberian honorarium di SKPD dimana pada tahun sebelumnya keputusan tersebut ditetapkan oleh Kepala SKPD sedangkan pada Tahun 2013 ditetapkan oleh Walikota Balikpapan.

Untuk penetapan Peraturan Daerah, terdapat draft Peraturan Daerah yang masih berproses di legislatif.

Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, berdasarkan hasil analisa bahwa penurunan ini merupakan dampak positif dari keberhasilan sosialisasi dan desimilasi produk hukum yang dilakukan.

Demikian juga dengan penanganan perkara hukum, dari target 15 kasus ternyata pada tahun 2013 hanya terjadi 4 kasus/perkara gugatan yaitu 3 kasus Perda dan 1 kasus PTUN. Dan ke-4 kasus tersebut telah dapat diselesaikan. Sehingga capaian kinerja mampu mencapai 100%.

Pencapaian sasaran strategis kedua ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Persentase penerbitan Peraturan Daerah	100%	90%
2. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	27 (12 bulan)	34 b(12 bulan)
3. Jumlah :		
➤ Perda	13	9
➤ Perwal	47	39
➤ Keputusan	437	919
4. Persentase keluarga sadar hukum	12	12
5. Jumlah pelanggaran PERDA	450	300
6. Persentase penyelesaian perkara hukum	40%	100%

Sasaran 3 : Meningkatnya hubungan kerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52	100%	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
2. Jumlah rapat MUSPIDA	23	22	95.6%	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	74	74	100%	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Jumlah kegiatan Kepala Daerah	240	236	98.33%	Pelaksanaan Acara Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Balikpapan
5. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	52 Tindak Lanjut	52 Tindak lanjut	100%	-
6. Jumlah jumpa pers	13	13	100%	Kerjasama Informasi dan Media Massa
7. Jumlah talk show	12	12	100%	Kerjasama Informasi dan Media Massa
8. Jumlah kerjasama	3	5	160%	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 3 meningkatnya hubungan kerja rata-rata mencapai **106.74 %**.

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 3 meningkatnya hubungan kerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Dalam rangka peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah, dilaksanakan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Apeksi
2. Forum kerjasama antar pemerintah dan pihak ketiga
3. Citynet Indonesia Chapter

Naskah kerjasama yang telah diperjanjikan pada tahun 2013, anatara lain :

1. Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan
2. Penyusunan strategi pembangunan kota rendah emisi
3. Diklat dasar pengukuran dan pemetaan kadastral bagi juru ukur di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
4. Kerjasama jaringan lintas perkotaan
5. Pengiriman diklat SIG.

Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2013 telah menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Lembaga lainnya sejumlah 74 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota : 45 kegiatan
2. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota : 22 kegiatan
3. Lembaga lainnya : 7 kegiatan.

Pencapaian sasaran strategis ketiga ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah <i>coffee morning</i>	54	52
2. Jumlah rapat MUSPIDA	10 Kegiatan	22 Kegiatan
3. Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	53	74
4. Jumlah kegiatan Kepala Daerah	240	236
5. Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	100%	100%
6. Jumlah jumpa pers	12	13
7. Jumlah talk show	14	12
8. Jumlah kerjasama	3	5

Sasaran 4 : Meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	2	2	100%	Implementasi Reformasi Birokrasi

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 4 meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur rata-rata mencapai **100 %**.

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 4 meningkatnya professional dan kesejahteraan aparatur telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan khususnya terkait dengan bidang manajemen perubahan, maka pada tahun 2013 telah ditetapkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur, implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Tunjangan Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga sudah diberlakukan sejak awal Januari 2013.

Perbandingan capaian sasaran tahun sebelumnya tergambar sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	1	2

Sasaran 5 : Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100 %	100%	100%	-
2. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100 %	100%	100%	Penyusunan LAKIP Kota Balikpapan Tahun 2012
3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	100%	97.01%	97.01%	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
4. Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100%	Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPD
5. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	13	11	84.6%	Penyusunan Uraian Jabatan
6. Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	100%	65%	65%	Implementasi persiapan/uji coba paperless Office
7. Persentase PPID Pembantu di SKPD	100% (51 SKPD)	100% (51 SKPD)	100%	Pengelolaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 5 Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja rata-rata mencapai **92.37 %**.

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 5 Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan

dan akuntabilitas kinerja telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja di Sekretariat daerah Kota Balikpapan khususnya dan Pemerintah Kota Balikpapan pada umumnya dilaksanakan melalui program Penyusunan LAKIP Kota Balikpapan Tahun 2012, Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPD, Revisi Kelembagaan, Implementasi paperless Office dan PPID.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 42 tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Tunjangan Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pasal 4 ayat (3), bahwa SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan pelaksanaan kegiatan maka Kepala SKPD tersebut akan dikenakan pemotongan tunjangan kerja sebesar 5 %, dalam hal ini, termasuk Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan). Laporan Bulanan dimaksud adalah laporan bulanan yang dikoordinir oleh Bagian Pembangunan dan paling lambat dikumpulkan setiap tanggal 10 per bulan berikutnya. Sedangkan SKPD yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka Kepala SKPD tersebut akan dikenakan pemotongan tunjangan kerja sebesar 10% per bulan keterlambatan sampai dengan LAKIP dikumpulkan. Batas akhir penyampaian LAKIP SKPD adalah akhir Februari pada tiap tahunnya dan dikumpulkan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Dengan adanya Peraturan Walikota ini, penyampaian pengumpulan LAKIP SKPD seluruhnya tepat waktu namun untuk penyampaian laporan masih berada pada posisi 97,01%.

Pada indikator persentase SKPD yang telah memiliki SOP, pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-502/2013 Tanggal 16 Juli 2013 Tentang Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 22 SKPD dan 9 Bagian Pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, telah dilaksanakan Penyusunan SOP pada 22 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan 9 Bagian Pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dengan jumlah SOP sebanyak 217 SOP.

Tahun 2012 penyusunan SOP dilaksanakan pada 10 SKPD/Unit Kerja dan pada tahun 2013 penyusunan SOP dilaksanakan pada 31 SKPD/Unit Kerja sehingga masih terdapat 35 SKPD/Unit Kerja yang masih dalam proses penyusunan SOP yaitu Kecamatan Balikpapan Kota dan Seluruh Kelurahan.

Program penataan/evaluasi kelembagaan pada tahun 2013 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan uraian jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan pada 11 Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PU
4. DTKP
5. Dinas Perhubungan
6. Disdukcapil
7. Disnakersos
8. DPKP
9. Dispenda
10. DKPP
11. Dinas Pasar.

Implementasi dalam program *paperless system* di Kota Balikpapan berada pada tataran uji coba. Namun dalam proses uji coba pada tahun 2013 Kementerian PAN dan RB mengeluarkan edaran Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintah, dan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo meluncurkan aplikasi **SI MAYA**. Untuk menyesuaikan dengan program pemerintah Pusat maka program *paperless system* di Kota Balikpapan tetap dilaksanakan untuk pengadaan perangkat keras, guna persiapan pelaksanaan *paperless system* , namun proses uji coba dialihkan pada aplikasi **SI MAYA**. apaian 65 % dimaksudkan pada tabel di atas adalah implementasi penyiapan perangkat keras uji coba *paperless system* telah dilaksanakan.

Dalam rangka keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) Kota Balikpapan dan Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah Pembantu (PPID Pembantu) pada masing-masing SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan. PPID yang telah dibentuk tahun 2013 sebanyak 51 SKPD dan 14 SKPD lainnya akan dibentuk tahun 2014.

Perbandingan capaian sasaran tahun sebelumnya tergambar sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
1	2	3
1. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%
2. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	100%	100%
3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	100%	97.01%
4. Persentase SKPD yang memiliki SOP	100% 10 SKPD/Unit Kerja	100% 31 SKPD/Unit Kerja
5. Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	0	84,6 % 11 SKPD
6. Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	65%	65%
7. Persentase PPID Pembantu di SKPD	0	100%

Sasaran 6 : Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1. Tersedianya rencana kebutuhan barang	10	10	100%	-
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	18 Kegiatan	16 Kegiatan	88%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran 6 Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana rata-rata mencapai **94 %**.

Dibandingkan dengan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada target tahun 2013, pencapaian sasaran 6 Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana telah mencapai target yang ditetapkan sehingga diyakini pada akhir tahun capaian perencanaan strategis dapat dipenuhi.

Rencana Kebutuhan Barang yang disusun oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan kompilasi dari rencana kebutuhan barang dari masing-masing Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Mengingat adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012

Nomor 6), maka rencana kebutuhan barang tahun 2013 mengalami perubahan menjadi 10 Bagian saja.

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional, Roda 4 (empat) 31 unit dan Roda 2 (dua) 36 unit;
2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
3. Pengadaan peralatan gedung
4. Pengadaan perlengkapan asrama Balikpapan
5. Meterisasi penerangan jalan umum
6. Pembayaran rekening bulanan penerangan jalan umum
7. Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12. Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum
13. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan rumah jabatan
15. Sewa gedung kantor
16. Rehabilitasi dan revisi instalasi jaringan listrik bangunan aset pemerintah

Terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan belum ada pemasangan lampu hemat energy pad PJU serta belum dilaksanakan pembuatan papan pengumuman karena adanya penataan ulang penerbitan ijin papan reklame di Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran strategis keenam ini, jika dibandingkan dengan capaian tahun adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2012	TAHUN 2013
3	3	4
1. Tersedianya rencana kebutuhan barang	11 Bagian	10 Bagian
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	27 Kegiatan	27 Kegiatan

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka ditetapkan anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun anggaran 2013.

APBD Kota Balikpapan pada tahun 2013 yang dialokasikan untuk biaya Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 454.715.584.019.63 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.886.749.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 434.828.835.019.63.

Realisasi anggaran Sekretariat Dearah Kota Balikpapan sebesar Rp. 278.640.881.203.60 dan mencapai persentase 61.28 %. Beberapa pos anggaran tidak dilaksanakan karena alasan yang telah diungkapkan dalam pengungkapan akuntabilitas kinerja, terdapat juga urusan pertanahan yang secara administrasi pertanahan sudah dilaksanakan namun belum terealisasi anggarannya serta terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas, anggaran makan dan minum serta pembayaran honorarium tim pelaksana.

Capaian akuntabilitas keuangan per sasaran strategis pada tahun 2013 digambarkan pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	6	7	8
1.	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	Rp. 109,847,836,264	Rp. 94,217,781,597	85,77%
2.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	Rp. 1,566,656,176	Rp. 993,459,800	63,41%
3.	Meningkatnya hubungan kerja	Rp. 62,492,333,000	Rp. 3,651,603,235	58,43%
4.	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	Rp. 187,000,000	Rp. 47,457,500	25%
5.	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	Rp. 811,740,500	Rp. 453,696,468	55,89%
6.	Meningkatnya sistem pengelolaan sarana dan prasarana	Rp. 195,968,761,190	Rp. 165,355,271,288	84,37 %

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2013 terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 54 (limapuluh empat) indikator kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis dan 54 (limapuluh empat) indikator kinerja, disimpulkan bahwa :

1. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 28 indikator kinerja dengan realisasi capaian 85.45%.

2. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 165.75%.

3. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 106.74%.

4. Pencapaian Sasaran 4.

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 100%.

5. Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5 terdiri dari 7 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 92.37%.

6. Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 94%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 6 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan trend yang baik untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Walau demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan sehingga harus mendapat perhatian dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran maupun pencapaian indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

B. SARAN

Untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan seperti yang disebutkan di atas maka strategi pemecahan masalahnya dalam upayanya untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

1) Peningkatan koordinasi antar Bagian

- Semakin intensifnya rapat koordinasi antar bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan visi dan pemahaman dengan dikoordinasikan oleh Asisten.
- Adanya konsistensi yang bulat dan utuh dari kesatuan visi dan pemahaman yang telah disepakati bersama dengan implementasinya di lapangan.

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia

- Pendidikan dan pelatihan dengan metode dan kurikulum yang reformatif yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan beban kerja yang lebih kompleks.
- Pembinaan mental spiritual aparatur Pemerintah Daerah.

3) Adanya pemisahan yang tegas antara fungsi Sekretariat Daerah sebagai Organizing, staffing, coordinating, fasilitating, servicing, dan Advising dengan fungsi Dinas sebagai Designing, operating, actuating. Sehingga fungsi pelaksana teknis operasional pelayanan yang sifatnya langsung kepada masyarakat ditangani sepenuhnya oleh Dinas. Sementara Sekretariat Daerah hanya memberikan servis (pelayanannya) fokus kepada Walikota dan Perangkat Daerah. Pemisahan fungsi secara tegas ini hanya dalam urusan pengelolaan suatu program kegiatan agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih kewenangan dan anggaran.





RENCANA KINERJA TAHUNAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tahun Anggaran : 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1.	Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Persentase pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi.	100% 100%
2.	Memaksimalkan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan publik	3. Persentase pemanfaatan TI dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelayanan publik 4. Terlaksananya online sistem e-government	100% 100%
3.	Meningkatkan citra pelayanan publik	5. Tersedianya unit pelayanan yang akan mengikuti kompetensi 6. Terlaksananya publikasi pelayanan publik 7. Persentasi partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik	2 UPP 100% 100%
4.	Penguatan akuntabilitas kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	8. Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%



Rencana Kinerja Tahunan 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
5.	Melaksanakan penataan perundang-undangan	9. Persentase penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah 10. Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan	100% 100%
6.	Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Perda dan produk hukum lainnya	11. Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	100%
7.	Mengembangkan pola hubungan yang efektif dan kerjasama teknis/operasional antar Bagian, SKPD dan Stakeholder	12. Persentase harmonisasi hubungan kerja	100%
8.	Mengintensifkan rapat-rapat koordinasi dan peninjauan lapangan	13. Jumlah rakor dan kunjungan lapangan	100%
9.	Meningkatkan sosialisasi dan promosi program kerja Kota Balikpapan	14. Jumlah sosialisasi dan promosi program kerja	100%
10.	Terlaksananya pembagian beban kerja	15. Terpenuhinya uraian tugas berdasarkan analisis formasi jabatan	100%
13.	Mengembangkan kompetensi aparatur	16. Jumlah diklat dan bimtek	100%
14.	Mengembangkan database pegawai	17. Persentase jumlah database pegawai	100%
16.	Penerapan sistem perbendaharaan yang berstandar, efektif dan efisien	18. Persentase Penerapan sistem perbendaharaan yang berstandar, efektif dan efisien	100%
17.	Menyelenggarakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan	19. Laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	100%

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1	2	3	4
18.	Mengembangkan tata kelola keuangan berbasis IT	20. Sistem tata kelola keuangan berbasis IT	100%
19.	Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan serta evaluasi pengendalian, pelaporan program pembangunan	21. Persentase sinkronisasi program pembangunan 22. Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung. 23. Persentase hasil evaluasi dan pengendalian program pembangunan 24. Jumlah dokumen Laporan Pembangunan	100% 100% 100% 100%
20.	Melaksanakan penataan pola organisasi / kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)	25. Jumlah lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)	100%
21.	Melaksanakan penguatan tatalaksana organisasi;	26. Penyusunan Prosedur dan mekanisme tata hubungan kerja dan atau SOP 27. Memfasilitasi penyusunan SPM 28. Memfasilitasi layanan yang berstandar mutu dan berbasis IT	100% 100% 100%
22.	Melakukan penertiban administrasi dan data base barang milik daerah	29. Tersedianya database barang milik daerah	100%
24.	Menyusun perencanaan kebutuhan Sarpras	30. Tersedianya rencana kebutuhan barang Setdakot	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
25.	Melaksanakan pengelolaan Sarana dan prasarana	31. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai kebutuhan.	100%

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN : 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan	1 Jumlah RT	1541	1541	100	Penilaian lomba Pengelola Terbaik Administrasi RT Tingkat Kota Balikpapan	Rp 272.002.000,00	Rp 263.248.200,00	97%	Bagian Pemerintahan
		2 Persentase Kelurahan berprestasi Tk. Kota	17,64%	17,64%	100	Pembinaan dan pemberian reward Lurah berprestasi 2013	Rp 101.342.000,00	Rp 89.871.950,00	89%	Bagian Pemerintahan
		3 Persentase RT yang memiliki administrasi baik	53,92%	53,92%	100	Pengadaan buku Administrasi Kecamatan, Kelurahan dan RT	Rp 47.812.000,00	Rp 45.248.100,00	95%	Bagian Pemerintahan
		4 Jumlah prestasi / penghargaan yang diterima Kota Balikpapan (Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional)	32	48	150					Bagian Humaspro
		5 Persentase penduduk yang memiliki KTP	87%	78,3%	90%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 543.920.000,00	Rp 378.939.000,00	70%	Disdukcapil
		6 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	63%	50,4%	80	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 401.270.000,00	Rp 164.192.100,00	4092%	Disdukcapil
		7 Persentase SKPD yang telah melaksanakan IKM	58%	74,71%	128%	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 222.700.000,00	Rp 139.112.393,00	62%	Bagian Organisasi
		8 Angka kemiskinan	10112 RTS	10065 RTS	99,53%	Operasional Program Raskin	Rp 474.796.000,00	Rp 323.877.250,00	68%	Bagian Perekonomian
		9 Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	70%	70%	100	Belanja Makan kelompok Kerja ULP	Rp 616.000.000,00	Rp 367.752.000,00	60%	Bagian Pembangunan
		10 Persentase permohonan bansos yang dapat ditindak lanjut	85%	67,84%	79,82	Program Bantuan sosial Pemerintah Kota Balikpapan Kepada Anggota Masyarakat	Rp 10.671.511.124,00	Rp 8.517.900.000,00	80%	Bagian kesra
		11 Persentase permohonan hibah yang dapat ditindak lanjut	90%	85,31%	92,73	Program Pemberian hibah Pemerintah kota Balikpapan Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi	Rp 79.251.926.540,00	Rp 73.487.445.040,00	93%	Bagian Kesra
		12 Jumlah SKPD yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen/aplikasi	46	46	100	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Teknologi Informasi	Rp 424.207.000,00	Rp 391.172.600,00	92%	Bagian Organisasi
		13 Persentase proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung.	60:40%	73,76: 26,24	122:65,6%	8 Program Kegiatan	Rp 5.294.657.300,00	Rp 2.968.839.872,00	56%	Bagian Pembangunan
		14 Persentase penyerapan anggaran belanja barang dan jasa	100%	95,13%	95,13%	1. Pengendalian Kegiatan APBD	Rp 267.180.200,00	Rp 236.860.175,00	89%	Bagian Pembangunan
						2. Operasional Pelaksanaan Pengadaan Investasi Pembangunan Coastal Road	Rp 875.000.000,00	Rp 515.611.100,00	59%	Bagian Pembangunan
						3. Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan	Rp 321.543.000,00	Rp 121.162.660,00	38%	Bagian Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						4. Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277.455.500,00	Rp 141.826.800,00	51%	Bagian Pembangunan
						5. Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota	Rp 127.482.000,00	Rp 110.036.425,00	86%	Bagian Pembangunan
						6. Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012	Rp 204.690.000,00	Rp 106.291.750,00	52%	Bagian Pembangunan
						7. Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 2.504.470.000,00	Rp 1.347.283.512,00	54%	Bagian Pembangunan
						8. Operasional Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Rp 716.836.600,00	Rp 389.767.450,00	54%	Bagian Pembangunan
		15 Jumlah dokumen Laporan Kegiatan	4	4	100	Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277.455.500,00	Rp 141.826.800,00	51%	Bagian Pembangunan
		16 Persentase penyelesaian pertanahan	100%	68%	68%	Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Rp 43.925.000,00	Rp 13.853.000,00	32%	Bagian KDAWP
		17 Nilai Investasi	5T	900M	18	-	-			Bagian Perekonomian
		18 a. Angka Inflasi	6,14%	6,14%	100					Bagian Perekonomian
		b. Angka PDRB	72476009 (000)	72476009 (000)	100					
		19 Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	10,6%	10,17%	95,94%					Bagian Perekonomian
		20 Angka Prasarana, Sarana dan Utilitas								Bagian Perekonomian
		Jumlah angkutan	1945	1945	100					Bagian Perekonomian
		Jumlah pasar tradisional	17	17	100					
		Jumlah rumah sakit	87	87	100					
		Jumlah hotel	60	60	100					
		Jumlah Restoran	372	372	100					
		Jumlah Toko/ supermarket	14	14	100					
		Jumlah Bank	143	143	100					
		Ketersediaan Listrik	191.169,7	191.169,7	100					
		21 Pengankaragaman pangan	2 lomba	2 lomba	100	Diversifikasi Pangan	Rp 212.275.000,00	Rp 94.431.400,00	44%	Bagian Perekonomian
		22 Persentase realisasi anggaran	55%	61,28%	111	Penyusunan Laporan dan Realisasi Anggaran Sekdadkot Balikpapan	Rp 104.790.500,00	Rp 98.010.750,00	94%	Bagian Keuangan
		23 Persentase administrasi batas wilayah	100%	100%	100%	1. Percepatan Pembangunan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi	Rp 834.000.000,00	Rp 729.353.000,00	87%	Bagian KDAWP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						2. Rakor Administrasi Batas Wilayah/Kota/ Kecamatan dan kelurahan	Rp 400.000.000,00	Rp 308.753.400,00	77%	Bagian KDAWP
		24 Jumlah operasi dalam rangka mewujudkan trantib	13	13	100	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Rp 760.335.000,00	Rp 734.405.000,00	97%	Bagian Pemerintahan
		25 Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara	100	97,61	97,61	Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan izin Membuka/ Memanfaatkan tanah negara	Rp 1.188.854.000,00	Rp 915.268.070,00	77%	Bagian KDAWP
		26 Angka kriminalitas	2189	2189					0%	Fungsional Polres
		27 Cakupan penanganan bencana	69	69	100	Penanganan Kejadian Bencana dan kebakaran	Rp 2.409.400.000,00	Rp 1.075.441.800,00	45%	Bagian Pemerintahan
2	Melaksanakan penataan perundang-undangan	29 Persentase penerbitan Peraturan Daerah	90%	90%	100					Bagian Hukum
		30 Jumlah sosialisasi dan desimilasi Perda dan produk hukum lainnya	12	12	100	Penyuluhan Produk Hukum	Rp 316.000.000,00	Rp 253.326.000,00	80%	Bagian Hukum
		31 Jumlah :				Legislasi produk hukum daerah	Rp 665.482.000,00	Rp 464.813.000,00	70%	Bagian Hukum
		1. Perda	10	9	90					
		2. Perwal	10	39	390					
		3. Keputusan	300	919	306					
		32 Persentase keluarga sadar hukum	100%	100%	100	Pembinaan Keluarga sadar hukum	Rp 107.150.000,00	Rp 82.128.400,00	77%	Bagian Hukum
		33 Jumlah pelanggaran PERDA	500	300	60	Pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan Daerah	Rp 84.830.000,00	Rp 70.316.000,00	83%	Bagian Hukum
		34 Persentase penyelesaian perkara hukum	4%	4	100	Proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum	Rp 393.194.176,00	Rp 122.876.400,00	31%	Bagian Hukum
3	Meningkatnya hubungan kerja	35 Jumlah <i>coffee morning</i>	52	52	100					Bagian Humaspro
		36 Jumlah rapat MUSPIDA	23	22	95,65	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah	Rp 2.500.000.000,00	Rp 1.090.850.800,00	44%	Bagian Umper
		37 Jumlah kunjungan kerja ke Pemkot Balikpapan	74	74	100	Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rp 273.025.000,00	Rp 188.182.186,00	69%	Bagian Pemerintahan
		38 Jumlah kegiatan Kepala Daerah	240	236	100	Pelaksanaan acara kedinasan dan penerimaan tamu pemerintah kota Balikpapan di luar jam kerja	Rp 932.882.000,00	Rp 795.955.450,00	85%	Bagian Humaspro
		39 Persentase tindak lanjut hasil <i>coffee morning</i>	52%	52%	100					Bagian Humaspro
		40 Jumlah jumpa pers	13	13	100	Jumpa Pers	Rp 146.450.000,00	Rp 131.076.000,00	90%	Bagian Humaspro
		41 Jumlah talk show	12	12	100	Talkshow di Radio dan Tv	Rp 150.898.000,00	Rp 77.140.000,00	51%	Bagian Humaspro
		42 Jumlah kerjasama	3 Keg	5 Keg	160	1. Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Rp 608.200.000,00	Rp 306.547.400,00	50%	Bagian KDAWP
						2. Forum Kerjasama antar pemerintah dari Pihak ketiga	Rp 951.818.000,00	Rp 516.654.899,00	54%	Bagian KDAWP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	UNIT KERJA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						3. Fasilitas Citynet Indonesia Chapter	Rp 685.960.000,00	Rp 545.196.500,00	79%	Bagian KDAWP
4	Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur	43 Jumlah kebijakan yang diterbitkan di bidang aparatur	2	2	100	Implementasi RB				Bagian Organisasi
5	Penguatan ketatalaksanaan, kelembagaan dan akuntabilitas kinerja	44 Persentase jumlah dokumen AKIP SKPD	100%	100%	100%					Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang menyampaikan laporan kegiatan bulanan tepat waktu	100%	97,01%	97,01	Pengembangan sistem evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Rp 277.455.500,00	Rp 141.826.800,00	51%	Bagian Pembangunan
		45 Presentase SKPD yang mengumpulkan Lakip Tepat Waktu	100%	100%	100	Penyusunan LAKIP Kota	Rp 199.788.000,00	Rp 106.829.684,00	53%	Bagian Organisasi
		46 Persentase SKPD yang memiliki SOP	100%	100%	100	Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPD	Rp 143.260.000,00	Rp 75.005.003,00	52%	Bagian Organisasi
		47 Persentase SKPD yang memiliki uraian jabatan	13%	11%	84,6	Revisi Kelembagaan	Rp 250.000.000,00	Rp 132.124.680,00	53%	Bagian Organisasi
		48 Persentase SKPD yang telah menggunakan <i>paperless office</i>	100	65	65%	Implementasi Paperless Office	Rp 53.325.000,00	Rp 28.280.000,00	53%	Bagian Organisasi
		49 Persentase PPID Pembantu di SKPD	100%	100%	100	pembentukan ppid	Rp 87.700.000,00	Rp 76.459.985,00	87%	Bagian Humaspro
6	Meningkatnya sistem pengelolaan Sarana dan prasarana	50 Tersedianya rencana kebutuhan barang	100%	100%	100	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Bagian Umper
		51 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi	18%	16%	88	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 77.493.295.250,00	Rp 66.038.730.188,00	85%	Bagian Umper





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAYID MN FADLI**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Pertama,

SAYID MN FADLI



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 306 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 2011-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Peraturan Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Daerah Kota ini.

Pasal 2

Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Daerah Kota ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by 'MN' and 'FADLI'.

SAYID MN FADLI